



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



**INDEKS SPBE
TAHUN 2021**

PEMERINTAH KAB. NATUNA

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2021 dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara instansi pusat dan pemerintah daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan semua pemangku kepentingan termasuk Kementerian Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, 29 Desember 2021

Deputi Bidang Kelembagaan
dan Tata Laksana,



Rini Widyantini
Rini Widyantini

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini. Namun hal ini ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, dimana hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal.

Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2021 ini akan menjadi *baseline* kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu diharapkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat digunakan dalam menentukan strategi tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interview melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen pendukung.

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses

1. Rintisan

- Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan Proses tata kelola dilaksanakan secara *ad-hoc*.

2. Terkelola

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.

3. Terstandar-disasi

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi.

4. Terintegrasi dan Terukur

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.

5. Optimum

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021

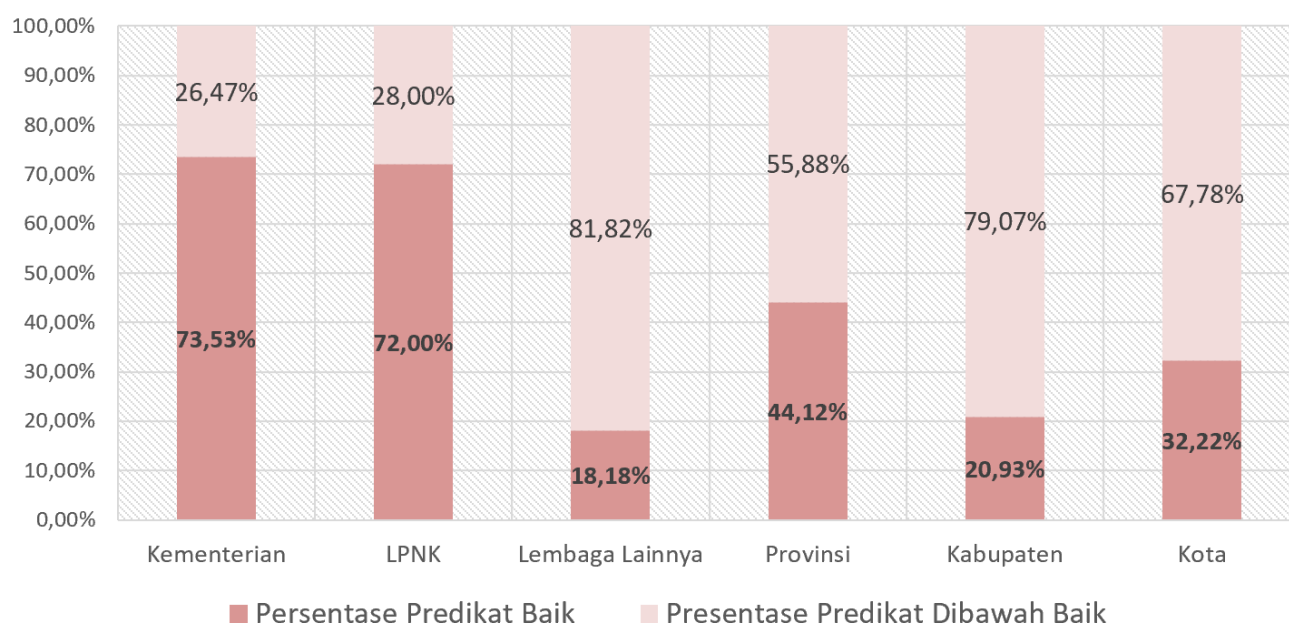
Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%
Aspek 1 - Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	18%

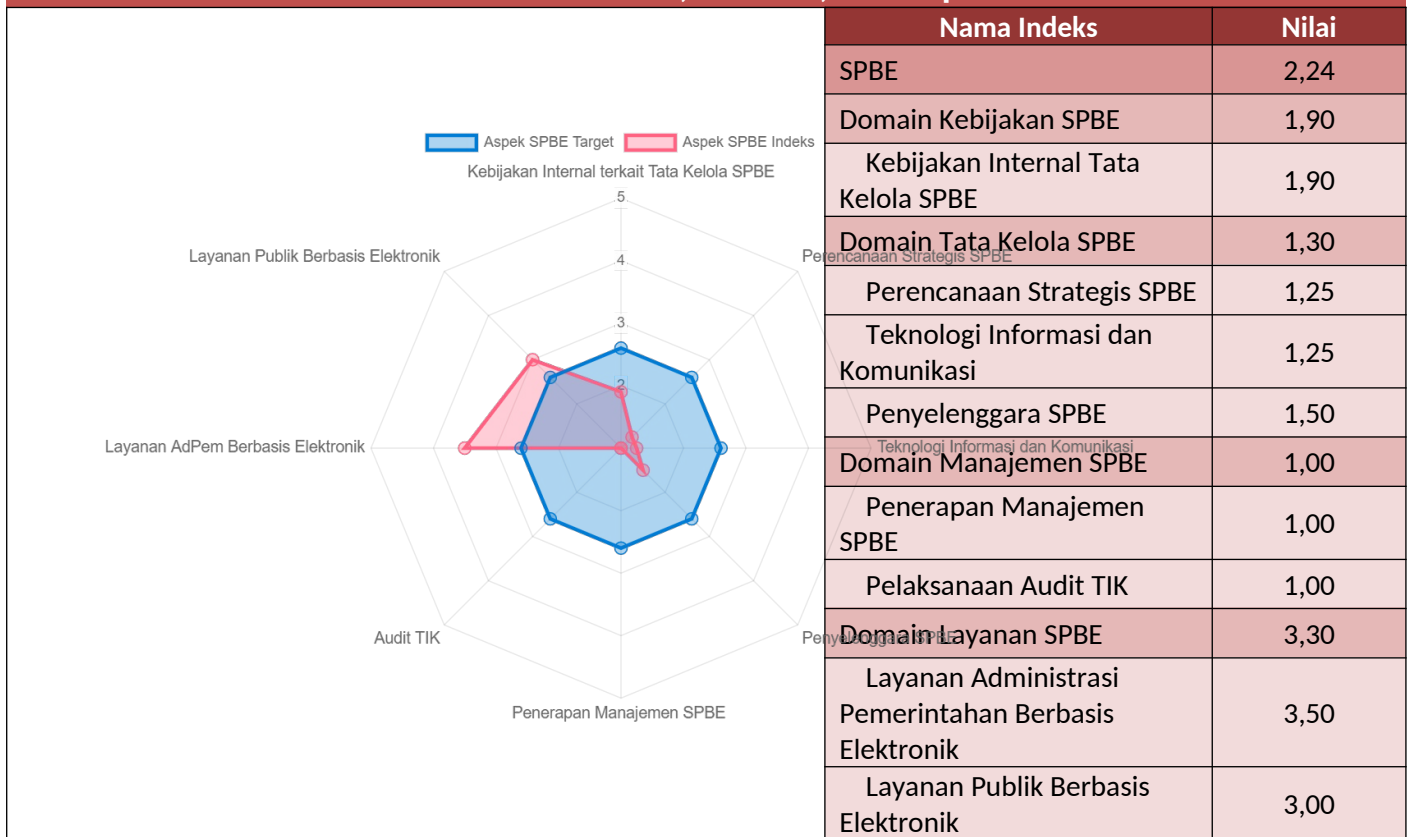
Predikat Indeks SPBE		
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,24	2,84	2,77	2,10	2,46	2,11	2,29
Domain Kebijakan	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Domain Tata Kelola	1,89	2,61	2,56	1,83	2,14	1,73	1,91
Perencanaan Strategis	1,77	2,36	2,47	1,80	1,91	1,62	1,78
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	2,86	2,71	1,86	2,36	1,82	1,99
Penyelenggaraan SPBE	1,93	2,59	2,46	1,82	2,16	1,78	2,02
Domain Manajemen	1,23	1,50	1,39	1,25	1,31	1,17	1,26
Penerapan Manajemen SPBE	1,26	1,53	1,37	1,25	1,35	1,20	1,29
Audit TIK	1,17	1,43	1,44	1,23	1,22	1,11	1,17
Domain Layanan SPBE	2,81	3,49	3,37	2,62	3,10	2,66	2,88
Administrasi Pemerintahan	2,86	3,50	3,48	2,86	3,14	2,71	2,88
Layanan Publik	2,74	3,49	3,21	2,26	3,04	2,59	2,88

Distribusi Nilai Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

Kekuatan dan Kelemahan
A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, indikator yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Natuna adalah indikator terkait Kebijakan internal tentang arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, manajemen data, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, dan Tim Koordinasi SPBE. Pemenuhan 6 indikator tsb didukung dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021

- Kekuatan**

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE ini, belum ada indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Pemkab Natuna (semua tingkat kematangan 4)

- Kelemahan**

Pemkab Natuna masih belum memiliki kebijakan internal untuk 4 indikator, yaitu: pembangunan aplikasi SPBE, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi dan audit TIK

B. Perencanaan Strategis SPBE

Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE, indikator yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Natuna adalah indikator 13: Rencana dan Anggaran SPBE

- Kekuatan**

Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE ini, belum ada indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Pemkab Natuna (semua tingkat kematangan 4)

- Kelemahan**

Pemkab Natuna tidak memiliki Perencanaan Strategis SPBE untuk indikator, yaitu: arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, dan Inovasi Proses Bisnis SPBE

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, indikator yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Natuna

adalah Layanan Jaringan Intra

- Kekuatan
Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini, belum ada indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Pemkab Natuna (semua tingkat kematangan 4)
- Kelemahan
Pemkab Natuna tidak memiliki Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk semua indikator, yaitu: Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan

D. Penyelenggara SPBE

Pada Aspek Penyelenggaraan SPBE, indikator yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Natuna adalah indikator tim koordinasi SPBE

- Kekuatan
Pada Aspek Penyelenggaraan SPBE ini, belum ada indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Pemkab Natuna (semua tingkat kematangan 4)
- Kelemahan
Pemkab Natuna tidak memiliki Penyelenggaraan SPBE untuk kolaborasi penerapan SPBE

E. Penerapan Manajemen SPBE

Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE, tidak ada indikator yang dipenuhi oleh Pemkab Natuna.

- Kekuatan
Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini, belum ada indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Pemkab Natuna (semua tingkat kematangan 4)
- Kelemahan
Pemkab Natuna belum ada Penerapan Manajemen SPBE untuk semua indikator penerapan manajemen resiko SPBE, penerapan manajemen keamanan informasi, penerapan manajemen data, penerapan manajemen aset, penerapan kompetensi SDM, penerapan manajemen pengetahuan, penerapan manajemen perubahan dan penerapan manajemen layanan SPBE

F. Pelaksanaan Audit TIK

Pada Aspek Audit TIK, tidak ada indikator yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Natuna

- Kekuatan
Pada Aspek Audit TIK, ini, belum ada indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Pemkab Natuna (semua tingkat kematangan 4)
- Kelemahan
Pemkab Natuna belum melakukan Audit TIK, untuk semua indikator, yaitu: pelaksanaan audit infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE maupun keamanan SPBE

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis Elektronik, ada 5 indikator yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Natuna adalah layanan perencanaan, layanan kepegawaian, layanan kearsipan dinamis, layanan pengelolaan barang milik daerah, layanan pengawasan internal pemerintah, dan layanan akuntabilitas kinerja organisasi

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis Elektronik, terdapat 5 indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Pemkab Natuna, yaitu layanan penganggaran, layanan keuangan, layanan pengadaan barang dan jasa, layanan kearsipan dinamis, dan layanan kinerja pegawai
- Kelemahan
Tidak indikator dalam aspek Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis Elektronik di Pemkab Natuna yang menjadi kelemahan dalam penerapan SPBE

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pada Aspek Layanan Publik berbasis Elektronik, indikator yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Natuna adalah indikator layanan pengaduan publik, layanan data terbuka, layanan publik sektor 1, layanan publik sektor 2 dan layanan publik sektor 3

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Publik berbasis Elektronik ini, terdapat 1 indikator yang menjadi kekuatan dalam

penerapan SPBE di Pemkab Natuna, yaitu indikator layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

- Kelemahan

Tidak ada indikator dalam aspek Layanan Publik berbasis Elektronik di Pemkab Natuna yang menjadi kelemahan dalam penerapan SPBE

Rekomendasi

Ringkasan

Nilai rerata aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan aspek layanan publik berbasis elektronik di Pemkab Natuna sebesar 3,5 dan 3,14. Bahkan nilai kematangan 5 dari 10 indikator dalam aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik adalah 4, yaitu indikator layanan penganggaran, layanan keuangan, layanan pengadaan barang dan jasa, layanan kearsipan dinamis dan layanan kinerja pegawai. Sedangkan indikator yang lain dalam aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik memiliki tingkat kematangan 3. Indikator jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) dalam aspek layanan publik berbasis elektronik memiliki nilai kematangan 4, sedangkan indikator lain dalam aspek ini memiliki nilai kematangan 2 dan 3.

Namun secara keseluruhan nilai indeks (rerata) aspek penerapan SPBE di bawah 2 (rendah/lemah). Selain 2 aspek yang memiliki nilai rerata di atas 3, dari 8 aspek penerapan SPBE terdapat 1 indikator memiliki nilai rerata sebesar 1 yaitu aspek audit TIK, dan beberapa aspek yang memiliki nilai rerata di bawah 2 yaitu aspek kebijakan internal, perencanaan strategis SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan SPBE, dan aspek penerapan manajemen SPBE. Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi SPBE yang dilakukan terhadap Pemkab Natuna sebagaimana yang ditunjukkan dalam kelemahan dan pemenuhan penerapan SPBE di semua aspek dan indikator, menunjukkan penerapan SPBE di Pemkab Natuna memiliki predikat kurang/lemah.

Keunggulan

Tidak ada keunggulan dalam semua aspek penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Natuna. Hal ini tampak dari 6 dari 8 aspek memiliki nilai rerata lebih kecil dari 2 bahkan 1. Namun ada 2 dari 8 aspek memiliki nilai rerata 3 yaitu layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, dan layanan publik berbasis elektronik. Khususnya aspek layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik memiliki nilai rerata sebesar 3,5.

Kelemahan

Meskipun ada 2 aspek dalam penerapan SPBE di Pemkab Natuna yang memiliki nilai rerata di atas 3, namun ada 6 aspek yang memiliki nilai rerata di bawah 2,6. Oleh karena itu kelemahan penerapan SPBE di Pemkab Natuna terjadi di aspek kebijakan internal, perencanaan strategis SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan SPBE, dan aspek penerapan manajemen SPBE, bahkan ada 1 aspek yang memiliki nilai rerata sebesar 1, yaitu aspek audit TIK.

Meski aspek kebijakan internal memiliki nilai rerata di atas 1, namun masih terdapat 4 indikator yang belum memiliki kebijakan internal, masih dalam rencana pembahasan, proses pembahasan, maupun dalam bentuk draft. Keempat indikator yang memiliki tingkat kematangan sebesar 1 ini adalah indikator pembangunan aplikasi SPBE, penggunaan sistem penghubung layanan, manajemen keamanan informasi dan indikator audit TIK.

Apresiasi/saran

Meski belum dapat dikategorikan keunggulan, aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik telah mencapai nilai aspek penerapan SPBE yang standar, bahkan aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik mencapai nilai rerata sebesar 3,5 (di atas 3,5 dikategorikan keunggulan). Oleh karena itu untuk layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dapat ditingkatkan lagi, terutama indikator yang telah bernilai 4, dapat mengakomodasi tindak lanjut berdasarkan hasil reviu atau monitoring.

Pada aspek kebijakan internal yang merupakan salah satu aspek yang lemah dalam penerapan SPBE dan menjadi dasar dan arah penerapan SPBE ini, perlu segera membuat kebijakan internal di semua indikator yang masih belum memiliki kebijakan internal dan membuat legalitasnya.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	2
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	1
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah	1
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	3
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	3
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	3
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	2
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3